

## **Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sebagai Penunjang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**Andy Chandra Pramana<sup>1</sup>, Meme Rukmini<sup>2</sup>, Duwi Riningsih<sup>3</sup>, Oktaviana Wahyu Prihardina<sup>4</sup>, Mayciella So<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Kadiri, Kediri

\*Korespondensi: andychandra@unik-kediri.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang mana telah mendapatkan opini WTP dari BPK 5 kali secara berturut-turut sehingga menarik untuk melakukan penelitian di sini apakah keberhasilan tersebut tidak lepas dari Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan dari BPK. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan diturunkan kepada 4 indikator yaitu kebijakan khusus terkait tindak lanjut, respon pihak lain, komitmen pimpinan dan motivasi pimpinan, kemudian diuji pengaruhnya dengan analisis regresi linier berganda. Hasilnya, 4 indikator tersebut memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dapat juga dilakukan di entitas lain yang memiliki prestasi lebih tinggi, misalnya opini WTP dari BPK berturut-turut selama 10 kali, agar dapat dijadikan acuan oleh entitas lain dalam menjaga dan memperbaiki kualitas LKPD.

**Kata Kunci** : tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; kualitas; laporan keuangan pemerintah daerah

### **Abstract**

*The research was conducted to obtain empirical evidence related to the effect of Follow-up Examination Recommendation Results on the Quality of Local Government Financial Statements. The Regional Government of Nganjuk Regency which has received WTP opinions from BPK 5 times in a row so it is interesting to conduct research here whether the success cannot be separated from the Follow-up Results of Examination Recommendations from BPK. Follow-up of the Examination Recommendation Results are derived to 4 indicators, namely specific policies related to follow-up, other parties' responses, leadership commitment and leadership motivation, then tested for their influence with multiple linear regression analysis. As a result, these 4 indicators have an influence on the quality of local government financial statements. This research can be developed on other entities that have higher achievements, such as WTP opinions from BPK consecutively for 10 times, so that they can be used as a reference by other entities in maintaining and improving the quality of their financial statements.*

**Keywords** : *follow-up recommendations on examination results; quality; local government financial statements*

## **I. PENDAHULUAN**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga milik negara yang memiliki peran sebagai pemeriksa eksternal dalam pengelolaan keuangan negara. Tugas BPK

adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Secara sistematis, Pemerintah Daerah menyampaikan LKPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, sebelum menyampaikan LKPD kepada DPRD, LKPD harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak eksternal yang independen, yaitu BPK. BPK memiliki *output* Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan *outcome* dalam bentuk peningkatan kualitas LKPD.

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas LKPD adalah sistem akuntansi, pengendalian internal dan kualitas SDM (Sari & Fadli, 2019). (Rahmi & Ariani, 2021) menyatakan temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak memiliki pengaruh terhadap opini. (Imtinan & Hasibuan, 2021) menyatakan temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan berpengaruh terhadap *financial statement disclosure*. (Essing et al., 2017) menyatakan bahwa kendala dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kurangnya pemahaman terhadap tata cara penindaklanjutan rekomendasi pemeriksaan, tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas, dan SDM yang masih kurang

Berdasarkan *research gap* di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang pengaruh tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Nganjuk, yang mana Kabupaten Nganjuk tergolong dalam Kabupaten yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali secara berturut-turut (2017-2022). Hal ini menjadi menarik apabila penelitian dilakukan di Kabupaten Nganjuk karena selain mengetahui pengaruh, penulis juga berharap ingin mengetahui ‘rahasia dapur’ dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, khususnya dalam perlakuan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Indikator tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dalam penelitian ini adalah kebijakan khusus, respon pihak lain, motivasi pimpinan dan komitmen pimpinan (Lusiana et al., 2017), sehingga masalah dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan khusus, respon pihak lain, motivasi pimpinan dan komitmen pimpinan memiliki terhadap kualitas LKPD, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan khusus, respon pihak lain, motivasi pimpinan dan komitmen pimpinan terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian diharapkan mampu menambah kesadaran Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara sistematis dan tuntas, karena temuan berulang masih sering ditemukan di lapangan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan sebuah Pemerintah Daerah meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). LKPD harus relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan sesuai dengan kriteria Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010. Opini WTP dari BPK adalah sebuah rekognisi berkualitasnya sebuah LKPD.

LKPD merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagai salah satu pilar tata pengelolaan pemerintah yang baik. Maka, Pemerintah Daerah mempunyai tujuan untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas guna menambah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang sedang dijalankan.

LKPD dianggap relevan jika data-data yang tersaji di LKPD dapat menunjukkan informasi yang dapat diprediksi keterjadiannya di masa yang akan datang. Disamping itu, LKPD yang relevan juga harus disajikan tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan. LKPD dikatakan andal apabila LKPD tersebut diuji kewajarannya. LKPD yang dapat dibandingkan

artinya adalah LKPD yang dapat dibandingkan dengan LKPD tahun sebelumnya maupun dengan LKPD Pemerintah Daerah lainnya, dalam periode yang sama.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Perencanaan tindak lanjut harus disusun dengan baik, mencakup strategi dan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan dilakukan. Dalam perencanaan juga ditentukan mengenai instrumen sumber daya yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia, peralatan, dan kebijakan. Proses penyelesaian ini juga memerlukan tahap pemantauan dan evaluasi untuk percepatan penyelesaian.

(Secinaro et al., 2021) menyatakan dalam sebuah pemeriksaan memiliki alur tertentu dan juga poin-poin yang saling berhubungan. (Borgato & Marchini, 2021) menyatakan dari sisi pemeriksa mengharapkan pihak yang diaudit mematuhi seluruh rekomendasi dari hasil audit. (Abdo et al., 2021) menyatakan sesungguhnya secara menyeluruh, audit akan memperbaiki kualitas suatu perusahaan.

(Lusiana et al., 2017) menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil dipengaruhi oleh kebijakan khusus tentang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, respon pihak lain, motivasi pimpinan dan komitmen pimpinan.

#### Hubungan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam setiap proses Pemeriksaan LKPD, BPK tentu mengharapkan adanya perbaikan dari Kualitas LKPD tahun mendatang yang akan dipikanya lagi, sehingga rekomendasi perbaikan selalu diberikan. Yang menjadi masalah adalah apakah setiap Pemerintah Daerah sadar akan tujuan tersebut atau tidak. Idealnya, ketika rekomendasi perbaikan tersebut dilaksanakan, tentu akan membawa dampak LKPD menjadi lebih baik. Dalam penelitian ini secara tidak langsung ingin mendorong sebuah Pemerintah Daerah untuk menuntaskan rekomendasi perbaikan tersebut melalui sebuah proses penyelesaian yang diturunkan ke dalam empat indikator yaitu: kebijakan khusus terkait tindak lanjut, respon pihak lain, komitmen pimpinan dan motivasi pimpinan. Keempat indikator tersebut tentu sangat mendukung keberhasilan dalam proses tersebut. (Lusiana et al., 2017) menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil dipengaruhi oleh kebijakan khusus tentang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, respon pihak lain, motivasi pimpinan dan komitmen pimpinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dinyatakan pengambilan hipotesis seperti di bawah ini:

H<sub>1</sub>: Kebijakan khusus terkait tindak lanjut memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H<sub>2</sub>: Respon pihak lain memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H<sub>3</sub>: Komitmen pimpinan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H<sub>4</sub>: Motivasi pimpinan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Objek dalam penelitian ini adalah kualitas LKPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk menjadi respondennya, yang mana ASN tersebut telah mengikuti lebih dari satu kali siklus akuntansi dan siklus audit pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan diasumsikan telah mengetahui tentang bagaimana kebijakan khusus tindak lanjut rekomendasi, respon

pihak lain dalam proses koordinasi, motivasi pimpinan dan komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Lokasi penelitian ini adalah BPKAD Kabupaten Nganjuk, yang mana Kabupaten Nganjuk mendapatkan opini WTP secara berturut-turut sebanyak 6 kali yaitu pada tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah ASN BPKAD Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 84 orang. Adapun cara untuk menentukan sampel dengan menggunakan rumus Slovin yang mendapati jumlah sampel sebanyak 46 sampel.

Kuesioner disebarakan untuk pengumpulan data. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung. Bagian pertama kuesioner berisi tentang kondisi sosial-demografis responden. Bagian kedua berisi tentang variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Peneliti juga melakukan observasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang menegenetahui tentang topik penelitian ini.

Variabel kebijakan khusus tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan diukur dengan item pernyataan yang mewakili indikator (1) adanya kebijakan khusus yang dibuat oleh pimpinan terkait dengan kewajiban tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) penerapan kebijakan; (3) penerapan kebijakan yang efektif dan efisien. Variabel respon pihak lain dalam proses koordinasi diukur dengan item pernyataan yang mewakili indikator (a) kecepatan pihak lain dalam merespon koordinasi terkait pelaksanaan rekomendasi; (2) ketepatan pihak lain dalam merespon koordinasi. Variabel motivasi pimpinan diukur dengan item pernyataan yang mewakili indikator (a) adanya sistem *reward and punishment* dalam proses penyelesaian; (b) adanya dorongan pemimpin untuk mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut. Variabel komitmen pimpinan diukur dengan item pernyataan yang mewakili indikator (a) pimpinan bersikap aktif dalam menginisiasi program tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; (b) pimpinan menginisiasi rapat guna melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut; (c) pimpinan membantu melakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

#### Metode Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data tentunya setelah melewati atau lolos uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, diantaranya adalah uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk mengukur pengaruh antar variabelnya. Berikut merupakan persamaan regresi dalam penelitian ini:

$$Y = a + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + \varepsilon$$

Dimana:

y	= kualitas
a	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= koefisien regresi
x <sub>1</sub>	= kebijakan khusus
x <sub>2</sub>	= respon pihak lain dalam proses koordinasi
x <sub>3</sub>	= motivasi pimpinan

$$x_4 = \text{komitmen pimpinan}$$

$$\varepsilon = \text{residual error}$$

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan uji asumsi klasik, terlebih dulu dilakukan uji validitas dan reabilitas guna memastikan valid dan reliabelnya data dalam penelitian ini. Tabel di bawah menunjukkan hasil uji validitas dan reabilitas.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Sig. Pearson	Keterangan
Kebijakan Khusus	0.000	Valid
Respon Pihak Lain	0.000	Valid
Motivasi Pimpinan	0.000	Valid
Komitmen Pimpinan	0.000	Valid
Kualitas LKPD	0.000	Valid

Dari tabel uji validitas tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan semua item pernyataan untuk semua variabel  $< \alpha = 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa item yang digunakan untuk semua variabel dalam penelitian ini sudah valid.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kebijakan Khusus	0.612	Reliabel
Respon Pihak Lain	0.661	Reliabel
Motivasi Pimpinan	0.606	Reliabel
Komitmen Pimpinan	0.645	Reliabel
Kualitas LKPD	0.617	Reliabel

Dari Tabel 2. dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diujikan dinyatakan lulus uji reliabilitas data dengan koefisien Cronbach's Alpha  $> 0,6$ . Di bawah ini merupakan hasil uji normalitas data dalam penelitian ini:

Tabel 3. Uji Normalitas Data

Variabel	Asym. Sig (2-tailed)
Kebijakan Khusus	0.295
Respon Pihak Lain	0.273
Motivasi Pimpinan	0.326
Komitmen Pimpinan	0.319
Kualitas LKPD	0.301

Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa data adalah normal karena asym sig. Bernilai di atas 0,05. Untuk uji multikolinearitas juga telah lolos, karena nilai VIF di kisaran angka 1, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kebijakan Khusus	0.882	1.088
Respon Pihak Lain	0.991	1.093
Motivasi Pimpinan	0.944	1.024
Komitmen Pimpinan	0.919	1.202

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, menghasilkan data seperti di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	t	Sig.
<i>(Constant)</i>	-4.540	0.000
Kebijakan Khusus	3.047	0.005
Respon Pihak Lain	3.915	0.000
Motivasi Pimpinan	9.167	0.009
Komitmen Pimpinan	7.573	0.002

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan khusus, respon pihak lain, motivasi pimpinan dan komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD karena nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Artinya, seluruh hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah diterima.

Tabel 6. Hasil uji R Square

R	R Square	Adj. R Square	Std. Error
0.731	0.534	0.519	1.067

Tabel di atas merupakan hasil uji R Square, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square adalah senilai 51,9%, artinya model penelitian ini dapat memengaruhi Variabel Y sebesar 51,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya.

## Pembahasan

Kebijakan khusus terkait tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan menjadi penting dalam proses tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan. Tentu kebijakan menjadi sebuah motor yang sangat efektif untuk proses penyelesaian kegiatan ini, yang mana aparatur

tidak akan bergerak apalagi memfokuskan penyelesaian kegiatan ini bila tidak ada target yang ditetapkan oleh Pimpinan, mengingat tupoksi aparatur yang telah menumpuk pada pekerjaan kesehariannya. Kebijakan juga berdampak pada respon pihak lain, dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di dalamnya adalah dinas, badan dan kecamatan.

Respon pihak lain menjadi momok dalam keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan, OPD merasa bahwa tugasnya hanyalah sebatas menyerahkan laporan kepada BPKAD bagian pelaporan untuk dikonsolidasi laporan keuangannya. Selepas itu tidak ada lagi tugas lain yang perlu diselesaikan. Dalam hal ini, kebijakan pimpinan terkait penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kendala respon dari pihak lain. Pimpinan tertinggi Pemerintah Daerah dapat menghimbau kepada seluruh OPD agar siap mendukung dan menyelesaikan proses ini hingga benar-benar tuntas.

Selain adanya kebijakan, peran pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan ini sangat vital, yaitu dalam tahap mengawal hingga proses ini selesai. Komitmen pimpinan diperlukan untuk penyelesaian kegiatan ini, skala prioritas pimpinan menjadi salah satu faktor yang dapat dilihat untuk menilai sejauh mana komitmen pimpinan terhadap proses penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan.

Pimpinan tentu tidak dapat menyelesaikan proses ini sendiri, terdapat aparatur pelaksana yang bertugas sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Peran pimpinan di sini adalah untuk mendukung dan memotivasi agar proses ini dilakukan dengan benar dan selesai. Motivasi pimpinan berpengaruh pada penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan, tentunya melalui pelaksana kegiatan tersebut.

Apabila hal ini ditarik pada hakikat pemeriksa yang selalu menginginkan perbaikan pada LKPD yang akan mereka periksa pada tahun selanjutnya maka pemeriksa tahun berjalan akan memberikan rekomendasi pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan mereka. Harapan pemeriksa adalah agar Pemerintah Daerah yang diperiksa dapat menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari temuan-temuan mereka, sehingga apabila tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan dapat terselesaikan dengan baik maka hal tersebut dapat menunjang kualitas sebuah LKPD.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris terhadap hasil penelitian dari (Lusiana et al., 2017) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan adalah respon pihak lain, kebijakan khusus terkait penyelesaian tindak lanjut hasil penyelesaian, komitmen pimpinan dan motivasi pimpinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh 4 faktor tersebut sebesar 51,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

## **V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah nilai kebijakan khusus, respon pihak lain, motivasi pimpinan dan komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD atau dengan kata lain tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan berpengaruh terhadap kualitas LKPD khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian

ini dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Kota/Kabupaten lain untuk memotivasi pelaksanaan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan dari BPK.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengukuran kualitas LKPD hanya terbatas pada tindak lanjut hasil pemeriksaan saja. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggali faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas LKPD layaknya penerapan sebuah sistem akuntansi sebagai penunjang dan atau kualitas Sumber Daya manusia (SDM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdo, M., Feghali, K., & Zgheib, M. A. (2021). The role of emotional intelligence and personality on the overall internal control effectiveness: applied on internal audit team member's behavior in Lebanese companies. *Asian Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2021-0048>
- Borgato, B., & Marchini, P. L. (2021). Auditors' perceptions of integrated reporting assurance: insights from Italy. *Meditari Accountancy Research*, 29(7), 31–53. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2019-0560>
- Essing, S. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, L. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 118–128. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15331>
- Imtinan, G., & Hasibuan, D. H. (2021). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 215–224. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.488>
- Lusiana, L., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Economia*, 13(2), 171. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.15180>
- Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2021). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 497–505. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.15851>
- Sari, G. I., & Fadli, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 17–34. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.3.17-34>
- Secinaro, S., Dal Mas, F., Brescia, V., & Calandra, D. (2021). Blockchain in the accounting, auditing and accountability fields: a bibliometric and coding analysis. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2020-4987>